



KR-Antara/Mohammad Ayudha

SUVENIR ASEAN PARA GAMES: Pekerja menyelesaikan pembuatan suvenir ASEAN Para Games 2022 berupa wayang Rajamala di Sanggar Wayang Gogon, Kentingan, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Rabu (20/7). Perajin mendapat pesanan sekitar 2.600 wayang kulit tokoh pewayangan Rajamala untuk suvenir atlet dan kontingen ASEAN Para Games 2022 pada 30 Juli-6 Agustus mendatang.

MK Tolak Gugatan Uji Materi Aturan Ganja Medis

JAKARTA (KR) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang diajukan sejumlah ibu dari pasien gangguan fungsi otak (cerebral palsy) serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Perkara 106/PUU-XVIII/2020 yang disiarkan secara daring di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu (20/7).

Pada sidang putusan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan, dalil permohonan para pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, Suhartoyo mengingatkan, penyalahgunaan Narkotika

Golongan I yang secara tidak sah diancam dengan sanksi ancaman pidana penjara sangat berat disebabkan negara benar-benar ingin melindungi keselamatan bangsa dan negara dari penyalahgunaan narkoba khususnya Narkotika Golongan I.

Permohonan uji materi penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 diajukan oleh Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Perkum-

pulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), dengan kuasa hukum Erasmus A T Napitupulu.

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Narkotika berbunyi, 'Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan'.

Sementara Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika berbunyi, 'Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan'.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose menyatakan sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materi UU

35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait isu penggunaan ganja untuk medis. "Saya sependapat dengan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi," kata Petrus.

Sebagai Kepala BNN, tutur Petrus, ia melihat dasar hukum dan UU yang sudah mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, yakni ganja. Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah dengan tegas menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Kemudian, Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Ant/San)-d

MASIH DIMATANGKAN KEMENAKER Skema Perlindungan Program Pensiun Pekerja

JAKARTA (KR) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya terus mematangkan skema perlindungan Program Jaminan Pensiun bagi pekerja, dengan harmonisasi masih dilakukan Pemerintah dalam memberikan perlindungan seperti diamanahkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam acara bertajuk 'Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun' di Jakarta, Rabu (20/7), Menaker menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini masih perlu melakukan harmonisasi dalam memberikan perlindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong-royong pada Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terdapat sebanyak 13,65 juta peserta Program Jaminan Pensiun. Jumlah itu di bawah total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022.

"Temuan angka menunjukkan, hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Menaker.

Ida Fauziyah mengajak para pihak termasuk peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif mengembangkan ide dan gagasan untuk melahirkan kebijakan inovatif dan skema baru yang dapat mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia.

Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri, perlu mempersiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua. "Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk skema Program Jaminan Pensiun mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," katanya. (Ant/San)-f

MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH Buat Kebijakan Pro UMKM

JAKARTA (KR) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah membuat kebijakan yang pro terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pesannya tadi kepada teman-teman kepala daerah bupati, expo ini bagus, lanjutkan terus dengan upaya mengembangkan UMKM, mulai dari membuat regulasi yang pro pada UMKM, perizinan mudah," kata Mendagri Tito Karnavian di Jakarta Rabu.

Usai memberi arahan sekaligus membuka gelaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2022 dengan tema 'Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui Jejaring Global', Mendagri mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian sehingga perlu adanya kebijakan yang mendukung keberadaan dan keberlangsungan mereka.

Dikatakan pula bahwa Indonesia punya sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah yang dapat dikelola dan diproduksi sebagai produk dalam negeri. Karena itu, dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, pangsa pasar diharapkan dapat dikuasai produsen dalam negeri. "Perkenalkan mereka dengan permodalan, banking, dan sektor finance supaya mereka bisa mendapatkan modal dengan bunga yang rendah, sekaligus kemudahan dalam proses dan persyaratan," kata Tito Karnavian. (Ant)-f

AKIBAT KANDUNGAN KIMIA

Vape Berpotensi Jadi Limbah Berbahaya

JAKARTA (KR) - Indonesian Youth Council for Tobacco Control (IYCTC) menjelaskan, setiap bagian tubuh rokok elektronik berupa vape berpotensi menjadi sebuah limbah berbahaya yang berakibat fatal pada lingkungan bumi akibat kandungan kimia di dalamnya.

"Rokok elektronik memiliki dampak negatif bagi lingkungan, dan harus dikelola sesuai dengan tata cara pengelolaan sampah B3 atau bahan berbahaya beracun, karena sampahnya yang sangat masif," ungkap Anggota Tim Youth Led dari IYCTC Oktavian Denta dalam Diseminasi Rokok Elektronik yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (20/7).

Penyebab utama dari pencemaran tanah, menurutnya, dapat terjadi karena kandungan baterai yang digunakan di dalam rokok elektronik mengandung bahan berbahaya beracun (B3). Di antaranya kadmium, lithium dan merkuri.

Denta menuturkan, kandungan tersebut merupakan sumber dari kontaminasi logam yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari lingkungan maupun zat-zat penting yang ada di dalam tanah. Kemudian pada sisi kartrid isi ulang cairan dalam rokok elektronik,

apabila cairan (liquid) yang digunakan sudah habis, maka kartrid masih dapat menampung sisa-sisa dari kandungan nikotin yang nantinya menyebabkan polutan di air.

"Ini bisa mengakibatkan banyak kejadian negatif, dimana air tersebut seharusnya diminimalkan oleh hewan-hewan dan lain sebagainya," kata Denta yang menjadi pemapar hasil kajian itu.

Menurut Denta, bahaya dari rokok elektronik tak luput dari uap yang dihasilkan oleh pengguna. Uap yang menyebar akan menjadi sumber yang potensial pada pencemaran udara karena mengandung zat aldehyd dan karbon dioksida yang tinggi.

Sayangnya, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Tim IYCTC pada 24 responden, 18 di antaranya membuang cairan ataupun alat rokok elektronik yang sudah tidak digunakan lagi, langsung ke tempat pembuangan umum (TPU) ataupun tempat sampah.

Tercemarnya lingkungan kemudian akan berdampak pada kesehatan sumber daya manusia di bumi. Sebab, rokok elektronik pun turut mengandung cairan B3 seperti nikotin, formaldehid atau formalin, propylene glycol, perisa, diacetyl dan particulate matter. (Ant/San)-d

Terseret Truk, Dua Pelajar Tewas

SALATIGA (KR) - Dua pengendara motor, Ahmad Zaki (18), warga Tuntang Kabupaten Semarang dan Linda Azzahra (18), warga Tingkir Lor Salatiga tewas. Keduanya, terseret truk di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, Rabu (20/7). Kedua korban diketahui siswa SMK 2 Warak Salatiga.

Menurut keterangan yang dihimpun KR menyebutkan, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut diduga disebabkan rem blong truk kontainer Nopol L 8596 UO yang mengangkut jagung meluncur dari arah selatan, Tingkir Salatiga menuju Semarang.

Diketahui JLS Salatiga dari arah selatan adalah jalan menurun. Diduga rem truk tidak berfungsi. Sampai di lokasi kejadian depan makam umum Ngemplak, truk sudah tidak bisa dikendalikan ke-

mudian menabrak pengendara motor yang berboncengan tersebut.

"Truk melaju cepat dan rem sepelempunya diduga blong. Kami mendengar benturan karena truk menabrak motor di depannya dan pohon, lalu terguling," ujar Yanto (40), salah satu warga sekitar lokasi keja-

dian.

Kanitlaka Satlantas Polres Salatiga, Ipda Mey-sal kepada wartawan mengatakan, truk diduga rem blong. Kemudian sopir berusaha untuk membanting stir ke kiri mendekati perempatan dan banyak kendaraan yang berhenti karena lampu lalu lintas

menyala merah.

"Untuk menghindari korban lebih banyak sopir truk berusaha membanting stir ke kiri ke arah pohon, ternyata di samping kiri truk ada pengendara motor. Kedua korban yaitu dua pelajar meninggal dunia," kata Meysal. (Sus)-f

JADI MITRA STRATEGIS PEMERINTAH

OJK Tingkatkan Pengawasan

JAKARTA (KR) - Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022- 2027 menegaskan komitmen OJK untuk lebih proaktif dan kolaboratif pada upaya terciptanya stabilitas, pertumbuhan dan penguatan industri jasa keuangan yang memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Ketua DK OJK Periode 2022 - 2027, Mahendra Siregar mengatakan berkomitmen dan mempertegas posisi OJK sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan demi terjadinya gerak ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan.

"Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak dan mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat," kata Ketua DK OJK Periode 2022 - 2027, Mahendra Siregar, di Jakarta, Rabu (20/7). Berita terkait di halaman 10.

Mahendra menjelaskan bahwa DK OJK juga menekankan pentingnya penguatan atas pengaturan dan pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan, termasuk pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan, pasar modal, dan non-bank (IKNB) serta kepatuhannya (compliance).

Sebagai langkah awal, OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan tetap mengusung prinsip kehati-hatian (prudential).

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital dan keuangan berkelanjutan.

Selain itu, untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawas-

an kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik, akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

ADK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat melalui pemberian informasi dan edukasi atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya. (Lmg)-f

Sambut ASEAN Para Games, Bangun Spirit Sportivitas dengan Konten Positif



Wiryanta, Direktur IKPMK Kementerian Kominfo menyerahkan secara simbolis wayang kulit kepada dalang Warseno Slank dalam pagelaran wayang kulit menyambut perhelatan ASEAN Para Games XI 2022, Sabtu (16/7) malam.

Kota Solo bakal menjadi tuan rumah ASEAN Para Games XI 2022 pada 30 Juli - 6 Agustus mendatang. Solo pun telah siap menyambut para peserta event olahraga bergengsi tersebut. Termasuk seluruh insan olahraga Tanah Air, terutama atlet-atlet paragra yang siap bertanding secara maksimal dan sportif.

Sportivitas inilah yang terus digaungkan Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Mereka senantiasa membangun sinergi dengan kementerian/lembaga terkait untuk bersamasama menularkan hal-hal positif tentang sportivitas dan keintaan pada budaya bangsa. Seperti mengadeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), INASPOC serta anak-anak muda yang eksis di media digital.

"Sinergi tersebut diimplementasikan dalam bentuk diseminasi informasi dan diskusi, baik melalui forum, deklarasi bersama cinta budaya Indonesia maupun pertunjukan rakyat. Harapannya agar generasi muda lebih dekat dalam mengenal budayanya sendiri, sehingga penetrasi nilai-nilai sportivitas, nasionalisme, budaya dan implementasi Pancasila dapat merasuk lebih dalam," tulis Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam keterangan resminya. Sejumlah event bertema sportivitas dan jiwa nasionalisme digelar Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia Kebudayaan Kementerian Kominfo dalam menyambut ASEAN Para Games XI 2022. Mulai dari forum pendidikan karakter Pancasila, dialog radio dan pertunjukan rakyat dengan tema besar Menjunjung Tinggi Nilai Sportivitas dan Jiwa Nasionalisme melalui Budaya dan Kearifan Lokal pada Sabtu-Minggu (16-17/7).

Kegiatan tersebut diikuti 150 orang, meliputi generasi muda, tokoh daerah dan masyarakat umum. Menghadirkan narasumber Kabid Penyelenggara E-Government Diskominfo Statistik dan Persandian Kota Solo Isnan Wihartanto, Direktur Kebudayaan BPIP Irene C. Sinaga, dan Youtuber Cindy Gulla. Selain itu, digelar pertunjukan wayang lakon Kangsa Adu Jago dengan dalang Ki Warseno Slank di Lapangan Kecamatan Juwiring, Klaten.

Isnan Wihartanto mengungkapkan, ASEAN Para Games XI diikuti 14 cabang olahraga, dengan jumlah 301 atlet dari Indonesia.

"Maskot ASEAN Para Games ini dari kearifan lokal ada pada patung Rajawala. Fungsinya sebagai tolak balak, yang artinya agar pada serangkaian acara ini tidak ada gangguan dan lancar. Keris galungan yang selalu melekat adalah simbol dari Kewibawaan dari panita dan peserta," tutur Isnana.

Sementara itu, Youtuber Cindy Gulla mengungkapkan, dengan ditunjukkannya Indonesia sebagai tuan rumah ASEAN Para Games XI 2022, harus dimanfaatkan anak-anak muda dengan baik. Termasuk oleh para content creator. Dia mengajak mereka untuk ikut sukseskan, misalnya dengan membuat postingan di media sosial dengan konten-konten positif. Selain itu, dia mengingatkan para pengguna media sosial untuk selalu bijak.

"Kita sebagai pengguna media harus bijak dalam menggunakannya. Selain itu, untuk content creator, jadilah content creator yang baik dan positif dalam menanggapi ASEAN Para Games 2022. Kita boleh kritis, tapi sebelum memposting harus lihat dulu kembali, sudah positif apa belum pesan kita," papar Cindy. (*)